

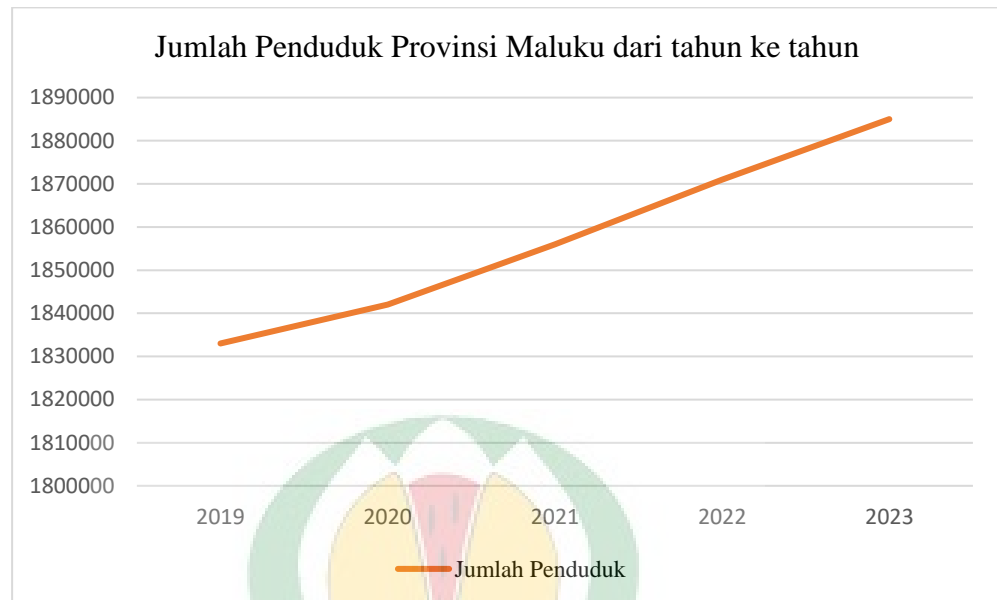
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Maluku, sebuah kepulauan yang terletak di bagian timur Indonesia, memiliki karakteristik demografis yang khas dan menarik. Provinsi ini memiliki jumlah usia produktif yang berlimpah. Hal ini menjadikan Maluku telah masuk di fase bonus demografi. Provinsi Maluku memiliki potensi besar untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat

Menurut Jeffrey, bonus demografi tidak hanya sekedar efek tingkat partisipasi tenaga kerja (kondisi dimana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), tetapi juga efek pertumbuhan. Tabungan siklus hidup, pendalaman investasi, arus modal asing, dan sekolah semuanya sangat dipengaruhi oleh transisi demografis. Bonus demografi ini dapat menjadi peluang emas bagi Maluku untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan bonus demografi tidak otomatis berjalan begitu saja akan tetapi memerlukan usaha dan strategi yang tepat.

Gambar 1.1 Populasi Penduduk¹

Sumber: Sumber: BPS Provinsi Maluku Dalam Angka 2020-2024

Terlihat pada diagram 1.1, pertumbuhan penduduk di Provinsi Maluku bertumbuh dari tahun ke tahun dengan garis kemiringan yang tidak terlalu curam. Diagram tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dibantu oleh tabel dibawah yang menjelsakan laju pertumbuhannya.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Maluku²

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (jiwa)	Laju Pertumbuhan P.
2019	1.802.870	-	1,75%
2020	1.848.923	46.053	1,83%
2021	1.862.626	13.703	0,99%

¹ Badan Pusat Statistik and Provinsi Maluku, *Provinsi Maluku Dalam Angka 2024*, ed. Avia J. Leatemala, *Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku*, 45th ed. (Ambon: BPS Provinsi Maluku, 2024), <https://maluku.bps.go.id/publication/2024/02/28/96a8ee596d346811c1e602b9/provinsi-maluku-dalam-angka-2024.html>.

² Ibid.

2022	1.881.727	19.101	1,01%
2023	1.945.648	14.000	1,28%

Sumber: BPS Provinsi Maluku Dalam Angka 2020-2024

Pada tabel 1.1, di tahun 2023, Provinsi Maluku telah mencatat jumlah penduduknya sebanyak 1.945.648 jiwa. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding data sensus penduduk di tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didukung oleh rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sekitar 1,37%. Laju pertumbuhan relatif stabil, dengan angka pertumbuhan tahunan berkisar antara 0,99% hingga 1,83%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk secara konsisten, meskipun tidak terlalu signifikan.

Peningkatan jumlah penduduk yang stabil ini tentu membawa konsekuensi tersendiri, khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia. Dalam pandangan Islam sendiri, populasi dipandang sebagai anugerah dan sumber daya berharga. Seperti yang disebutkan di dalam QS. *Al-Baqarah* 2:30.³ Oleh karena itu, Peningkatan populasi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan. Keseimbangan antara kuantitas dan kualitas populasi menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi bonus demografi⁴. Islam tidak melihat penduduk sebagai suatu kesatuan yang

³ Qur'an Kemenag, "Al-Baqarah," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, last modified 2022, accessed June 26, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=30&to=30>.

⁴ Minan, A. K., 'Manajemen Pendidikan Islam dan Penyiapan Bonus Demografi Indonesia Tahun 2045.' *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(01), 116-131.

tunggal, dengan banyaknya penduduk tidak menjadikan suatu negara itu maju, perlu adanya kuantitas yang mumpuni ditandai dengan tingginya indeks pembangunan manusia dan partisipasinya mereka dalam dunia kerja.

Populasi penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Economically Active Participation) dan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan tiga faktor yang saling berkaitan erat dan memiliki pengaruh terhadap rasio ketergantungan. Adapun penyerapan Tenaga kerja menjadi salah satu dari dua faktor lain yang juga memiliki dampak terhadap rasio ketergantungan. Berikut adalah perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Maluku

Tabel 1.2 Tingkat Partisipas Angkatan Kerja Provinsi Maluku⁵

Tahun	TPAK (%)
2019	63,04
2020	65,07
2021	65,75
2022	65,46
2023	63,60

Sumber: BPS Provinsi Maluku Dalam Angka 2020-2024

Tingkat partisipasi angkatan kerja (Economically Active Participation) selama lima tahun terakhir (2019-2023) di provinsi maluku cenderung fluktuatif yang cenderung konstan dikarenakan hanya berkisaran di angka 63,4 sampai dengan 65,74. Kenaikan angka TPAK per tahun berpengaruh

⁵ BPS Provinsi Maluku, *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku 2023*, ed. BPS Provinsi Maluku, 1st ed. (Ambon: BPS Provinsi Maluku, 2023), <https://maluku.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/635/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-08-persen--tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--sebesar-63-82-persen-.html>.

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. akan tetapi di tahun 2023 kemarin angkanya menurun di kisaran 63,60% dari tahun 2021. TPAK menjadi parameter utama dalam mengukur sukses tidaknya bonus demografi yang akan berlangsung di suatu daerah, hal ini berkaitan dengan sebab akibat diatas, dimana penduduk usia muda (produktif) menopang beban penduduk usia lanjut (non produktif). Besar kecilnya angka TPAK berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan.⁶ Menurut Eppy dan Assa, rasio ketergantungan dan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat. Sedangkan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat menaikkan rasio ketergantungan.⁷

Islam memandang kerja sebagai sebuah ibadah dan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Dalam pandangan Islam, bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan mencapai ridho Allah SWT. Oleh karena itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang tinggi dipandang positif dalam Islam. Kewajiban bekerja ditujukan kepada setiap muslim yang mampu untuk bekerja dan mencari nafkah. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. *Al-Jumu'ah* 62: 10 yang menganjurkan umat

⁶ Eppy Yuliani Assa Faelassuffa, Kajian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Indeks, *Jurnal Kajian Ruang*, 1.1 (2021), pp. 49–61.

⁷ Ibid.

Islam untuk bekerja setelah selesai shalat Jumat,⁸ dan QS. *At-Talaq* [65]: 6 yang memerintahkan pemberian nafkah bagi istri yang diceraikan.⁹

Selain tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia juga memiliki pengaruh terhadap rasio ketergantungan. Menurut Nurul dan Hijri¹⁰ dengan judul penelitian Analisis Rasio Ketergantungan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh bahwa rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa tingginya indeks pembangunan manusia dapat menurunkan rasio ketergantungan.

Di Provinsi Maluku, tingkat Indeks Pembangunan Manusia terus bertambah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku¹¹

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Maluku	0,69	0,69	0,69	0,702	0,709

⁸ “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”. Qur’an Kemenag, “Al-Jumu’ah,” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, last modified 2022, accessed June 26, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/62?from=1&to=11>.

⁹ “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”. Qur’an Kemenag, “At-Talaq,” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, last modified 2022, accessed June 26, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>.

¹⁰ Shalihah, N., Juliansyah, H., & Rahmah, M. Analisis Rasio Ketergantungan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, (2022). 4(2), 30–38.

¹¹ BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku 2021-2023,” *Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku*, last modified 2023, accessed June 23, 2024, <https://maluku.bps.go.id/indikator/26/216/1/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-maluku.html>.

Sumber: BPS Provinsi Maluku Dalam Angka 2020-2024

Pada tabel 1.3, terlihat mulai pada tahun 2022 Provinsi Maluku telah memasuki *stage* atau tingkatan yang berbeda ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Angka indeks pembangunan manusia di provinsi tersebut telah masuk dalam kategori tinggi jika diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan *World Bank*¹² yakni 0,702 di tahun 2022 dan 0,709 di tahun 2023. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji apakah kenaikan indeks pembangunan manusia mempengaruhi naik turunnya angka ketergantungan. Karena di lain sisi IPM sangat berpengaruh signifikan terhadap suatu negara. Hubungan antara IPM dan ekonomi bersifat timbal balik, artinya peningkatan IPM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan IPM.¹³

Peningkatan IPM yang signifikan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas. Dilain sisi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kacamata ekonomi Islam tidak hanya dilihat sebagai ukuran pencapaian pembangunan manusia dalam hal umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak saja. Menurut Anggatira dalam tulisannya "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam", menyatakan bahwa, indeks pembangunan manusia tidak berputar hanya

¹² United Nations Development Programme, "Human Development Index (HDI)," *United Nations Development Programme*, last modified 2024, accessed June 26, 2024, <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>.

¹³ Ejiro U. Osiobe, "A Literature Review of Human Capital and Economic Growth," *Business and Economic Research* 9, no. 4 (2019): 179.

persoalan yang dibahas ekonomi konvensional Lebih dari itu, IPM dalam perspektif Islam juga mempertimbangkan aspek-aspek spiritual, moral, dan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Adapun tingginya angka faktor-faktor demografi di atas (populasi penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks pembangunan manusia) berakibat pada rendah rasio ketergantungan provinsi maluku hal ini dapat dibuktikan dengan persentase rasio ketergantungan Provinsi Maluku pada tabel dibawah.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk (Usia Produktif, Non Produktif)¹⁵

Tahun	Usia Produktif	Usia tidak Produktif	<i>Dependency Ratio</i>
2019	1.138.851	664.019	58%
2020	1.080.028	590.492	55%
2021	1.274.064	588.762	46%
2022	1.296.968	588.759	45%
2023	1.316.984	603.478	46%

Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan R. Prov. Maluku Tahun 2020-2024

Pada tahun 2023, Terdapat 68,58% atau sekitar 1.316.984 jiwa penduduk usia produktif dan 31,42% atau 603.478 jiwa penduduk usia non

¹⁴ Anggatia Ariza, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Islam," *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak* 1, no. 4 (2012): 1–21, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=961652&val=14778&title=PE](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=961652&val=14778&title=PE%20NGARUH%20PERTUMBUHAN%20EKONOMI%20DAN%20BELANJA%20MODAL%20TERHADAP%20INDEKS%20PEMBANGUNAN%20MANUSIA%20IPM%20DALAM%20PERSPEKTIF%20ISLAM.)

¹⁵ Statistik and Maluku, *Provinsi Maluku Dalam Angka 2024*.

produktif di tahun 2023. Adapun rasio ketergantungannya yakni sebesar 46%. Data-data tersebut menunjukkan bahwa adanya jumlah penduduk usia produktif yang memiliki peran serta potensi yang besar dalam memajukan perekonomian di Maluku. Namun, dengan keadaan yang ada dan dinamika kependudukan yang kompleks malah menjadikan provinsi ini duduk pada provinsi termiskin keempat.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Miskin¹⁶

No.	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)		
		Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
		2023	2023	2023
1	Papua	5,68	34,49	26,03
2	Papua Barat	8,23	29,2	20,49
3	Nusa Tenggara Timur	9,12	23,76	19,96
4	Maluku	5,49	24,64	16,42
5	Gorontalo	4,47	23,73	15,15
6	Aceh	9,79	16,92	14,45

Sumber: BPS, data sekunder, 2024

Pada tabel 5.1 diatas, terlihat bahwa Provinsi maluku berada pada urutan keempat provinsi termiskin setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan jumlah penduduk miskin nya sebesar 16,42%. Walaupun demikian, tingginya kemiskinan di provinsi ini tidak menjadikan provinsi ini menjadi provinsi yang tidak bahagia. Faktanya, provinsi ini

¹⁶ Ibid.

menjadi provinsi terbahagia ketiga setelah Maluku utara dan Kalimantan Utara.¹⁷ Menurut berbagai kajian empiris, tingginya tingkat kemiskinan biasanya diikuti dengan tingginya rasio ketergantungan.¹⁸ Mestinya jika rasio ketergantungan rendah maka tingkat kemiskinan juga ikut rendah dan disusul juga dengan indeks kebahagiaan yang tinggi. Dan apa pandangan Islam mengenai fenomena tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan karena mengelaborasi variabel populasi penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan sebagai variabel moderat untuk mengukur pengaruhnya terhadap *dependency ratio* Provinsi Ambon, dimana hal penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penelitian lain.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan variabel populasi penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia dan kemiskinan sebagai variabel moderat guna mengukur dampaknya terhadap rasio ketergantungan di Maluku, yang selanjutnya dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah Maluku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yakni:

¹⁷ Badan Pusat Statistik, "Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi, 2014-2021," *Badan Pusat Statistik*, last modified 2022, accessed June 26, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjAxIzI=/indeks-kebahagiaan-menurut-provinsi.html>.

¹⁸ D D Ferian and E Y A Gunanto, 'Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan Dan Bagaimana Penanggulangannya: Studi Empiris Pada 29 Kabupaten Di Jawa Tengah 2014-2020', *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2021, pp. 172-93 <<https://media.neliti.com/media/publications/455468-none-8a1a4a8a.pdf>>.

1. Apakah Populasi penduduk mempengaruhi dependency ratio Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
2. Apakah tingkat partisipasi angkatan kerja mempengaruhi dependency ratio Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
3. Apakah indeks pembangunan manusia mempengaruhi dependency ratio provinsi maluku pada tahun 2019-2023
4. Apakah kemiskinan mempengaruhi dependency ratio Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
5. Apakah kemiskinan memoderasi hubungan populasi penduduk terhadap dependency ratio Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
6. Apakah kemiskinan memoderasi hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap dependency ratio Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
7. Apakah kemiskinan memoderasi hubungan indeks pembangunan manusia terhadap dependency ratio Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada ruang lingkup Provinsi Maluku sejak tahun 2019 hingga 2023. Sedangkan penelitian ini berfokus hanya kepada populasi penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel bebas dan *dependency ratio* sebagai variabel terikat dan peneliti juga menetapkan kemiskinan sebagai variabel moderat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dijabarkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menguji dan mengetahui apakah populasi penduduk mempengaruhi *dependency ratio* Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
2. Untuk menguji dan mengetahui apakah tingkat partisipasi angkatan kerja mempengaruhi *dependency ratio* Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
3. Untuk menguji dan mengetahui apakah indeks pembangunan manusia mempengaruhi *dependency ratio* Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
4. Untuk menguji dan mengetahui apakah kemiskinan mempengaruhi *dependency ratio* Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
5. Untuk menguji dan mengetahui apakah kemiskinan memoderasi hubungan populasi penduduk terhadap *dependency ratio* Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
6. Untuk menguji dan mengetahui apakah kemiskinan memoderasi hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap *dependency ratio* Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023
7. Untuk menguji dan mengetahui apakah kemiskinan memoderasi hubungan indeks pembangunan manusia terhadap *dependency ratio* Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara praktis (Operasional)
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pengaruh populasi penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan menjadi variabel moderasi terhadap rasio ketergantungan di Provinsi Maluku
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pertimbangan dan solusi tersendiri bagi pemerintah dan pembaca dalam menyikapi fenomena bonus demografi
2. Secara teoritis (Akademisi)
 - a. Hasil penelitian ini dapat membantu akademisi dalam memahami bagaimana pengaruh populasi penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia mempengaruhi rasio ketergantungan di Provinsi Maluku pada tahun 2019-2023 dengan kemiskinan sebagai variabel moderat.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bonus demografi

F. Definisi Operasional

Populasi penduduk adalah total jumlah orang yang tinggal di suatu area atau wilayah tertentu pada waktu tertentu. Ini bisa merujuk pada jumlah

penduduk di negara, kota, desa, atau wilayah lainnya. penduduk yang dimaksud adalah penduduk provinsi maluku

Tingkat partisipasi angkatan kerja mengacu pada persentase jumlah orang yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan aktif dalam usia kerja (biasanya antara 15-64 tahun) dibandingkan dengan total populasi dalam kelompok usia tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran yang digunakan untuk menilai perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. IPM menggabungkan beberapa indikator penting, seperti harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita, untuk memberikan gambaran lebih holistik tentang kualitas hidup dan perkembangan manusia di suatu wilayah.

Penduduk miskin diukur berdasarkan garis kemiskinan. BPS menggunakan standar garis kemiskinan sebagai batas untuk menentukan seseorang atau keluarga yang dianggap miskin. Garis kemiskinan ini mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Orang atau keluarga yang pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dianggap sebagai penduduk miskin menurut definisi BPS.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah individu di kelompok usia yang tidak bekerja (usia dibawah 15 tahun dan di atas usia 64 tahun ke atas) dengan jumlah individu di usia kerja (rentang usia 15-64 tahun). Para ahli menggunakannya untuk mengukur

beban ekonomi yang ditanggung oleh individu yang bekerja terhadap mereka yang tidak bekerja dalam suatu populasi. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh mereka yang bekerja untuk mendukung mereka yang tidak bekerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi bonus demografi Provinsi Maluku tahun 2019-2023 adalah pengaruh populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia terhadap keberhasilan bonus demografi di provinsi maluku dalam hal ini dilihat dari pengaruhnya terhadap rasio ketergantungan dan kemiskinan menjadi faktor yang memperkuat atau memperlemah faktor-faktor di atas terhadap rasio ketergantungan .

